



Pengaruh Kebijakan Perpustakaan terhadap Akses Informasi: Studi Bibliometrik

Muhaemin

Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia
Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

Korespondensi: *muhaemn21001@mail.unpad.ac.id*

Diajukan: 30-03-2024; **Direvisi:** 24-07-2024; **Diterima:** 25-07-2024

Abstract

This study aims to analyze and map bibliometrically the results of research in the Dimensions database on the effect of library policy on inclusive, fair and quality information access for the community. The method used is a bibliometric study by analyzing 125 research sources from the Dimensions database in the 2014-2023 time span. The analysis was conducted using Biblioshiny to map authors, sources, countries and dominant keywords. There are three categories of information access, namely Open access, Close access, and Closed and open access. The countries that published the most research were the United States and South Africa. Some of the dominant keywords are public libraries and academic libraries. The results of this study show that library policies have an influence in providing access to information for the public. There are challenges in implementing policies that support equal access, especially for minority groups and people with disabilities. This research trend focuses on public and academic libraries as the frontline in providing access to information for people from all walks of life. In conclusion, this research emphasizes the importance of developing dynamic and responsive library policies to address structural inequalities, improve accessibility and bridge the digital divide in accessing information.

Keywords: library policy; information access; bibliometrics; biblioshiny

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan secara bibliometrik hasil penelitian pada *database* Dimensions mengenai pengaruh kebijakan perpustakaan terhadap akses informasi yang inklusif, adil dan berkualitas bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi bibliometrik dengan menganalisis 125 sumber penelitian dari basis data Dimensions dalam rentang waktu 2014-2023. Analisis dilakukan dengan menggunakan Biblioshiny untuk memetakan penulis, sumber penelitian, negara, dan kata kunci yang dominan. Terdapat tiga kategori akses informasi, yaitu *Open access*, *Closed access*, dan *Closed and open access*. Negara yang paling banyak mempublikasikan hasil penelitiannya adalah Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Beberapa kata kunci yang dominan adalah *public libraries* dan *academic libraries*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perpustakaan memiliki pengaruh dalam menyediakan akses informasi bagi masyarakat. Terdapat tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan akses, terutama bagi kelompok minoritas dan penyandang disabilitas. Tren penelitian ini berfokus pada perpustakaan umum dan akademis sebagai garda terdepan dalam menyediakan akses informasi bagi masyarakat luas di semua kalangan. Kesimpulannya, penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan kebijakan perpustakaan yang dinamis dan responsif untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural, meningkatkan aksesibilitas, dan menjembatani kesenjangan digital dalam mengakses informasi.

Kata Kunci: kebijakan perpustakaan; akses informasi; bibliometrik; biblioshiny

Pendahuluan

Perpustakaan merupakan pusat informasi dan sumber ilmu pengetahuan yang berperan penting dalam mendukung pendidikan dan penelitian. Salah satu fungsi utama perpustakaan adalah menyediakan akses informasi bagi akademisi, peneliti dan masyarakat umum. Namun, ketersediaan informasi saja tidak cukup tanpa adanya kebijakan yang mendukung akses informasi. Kebijakan perpustakaan berfungsi sebagai pedoman dan standar layanan yang menjamin hak-hak pengguna untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan. Kebijakan perpustakaan berperan untuk mengarahkan perkembangan dan layanan perpustakaan, mendorong warisan budaya, menumbuhkan nilai-nilai dasar, dan mendorong kebiasaan yang beradab di zaman modern (Zheng et al., 2022).

Banyaknya informasi yang tersebar saat ini memiliki beragam nilai dan pengetahuan serta kualitas dan kredibilitas yang perlu dipertimbangkan oleh masyarakat. Sebagai salah satu lembaga informasi, perpustakaan bertanggung jawab untuk membantu pemustaka mendapatkan informasi yang relevan dan terpercaya di era ledakan informasi (Davlatov, 2022). Salah satu cara yang memungkinkan adalah dengan menetapkan kebijakan akses informasi. Kebijakan tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tata kelola yang baik dan tanggung jawab klien terhadap para pemangku kepentingan yang terkena dampak (European Bank, 2019). Adanya kebijakan informasi dapat memfasilitasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi yang lebih kredibel. Selain itu, adanya kebijakan informasi juga dapat menentukan informasi apa saja yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum yang biasa disebut dengan *open access* ataupun informasi apa saja yang hanya bisa diakses oleh orang tertentu atau *closed access*.

Informasi yang bersifat *open access* atau yang dapat diakses oleh masyarakat umum merupakan konsep yang mempromosikan akses seluas mungkin terhadap informasi dari perpustakaan yang melibatkan kolaborasi antar perpustakaan untuk menyebarluaskan dan bertukar informasi secara efektif (Yusniah et al., 2023). Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas biasanya informasi yang sifatnya umum dan mudah untuk didapatkan karena tidak memerlukan biaya atau gratis. Dalam hal ini perpustakaan sebagai lembaga non komersial berperan penting dalam mendukung informasi *open access* dengan menyediakan layanan seperti *platform hosting* dan dukungan teknis lainnya (Wojturska, 2022), sehingga masyarakat dapat dengan mudah dan cepat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.

Open access dapat meningkatkan penelitian, pengajaran, dan pembelajaran di lingkungan pendidikan, karena dengan akses yang lebih banyak dan mudah terhadap hasil penelitian ilmiah akan memperkuat tingkat sitasi dan menawarkan informasi yang bebas hambatan bagi para pengajar dan pelajar (Kassahun & Nsala, 2017). Namun pada kenyataannya tidak semua informasi yang bersifat *open access* memiliki kualitas informasi yang lebih kredibel dan relevan. Informasi yang berkualitas biasanya didapatkan dari hasil penelitian yang diakui ataupun dipublikasikan oleh lembaga atau organisasi yang memiliki akreditasi. Meskipun suatu lembaga memiliki repositori dengan akses terbuka, namun sebagian besar informasi ilmiah dan informasi yang bersifat teknis masih belum tersedia di repositori tersebut, ada beberapa informasi yang dapat diakses namun tidak secara menyeluruh, terdapat juga beberapa pembatasan isi yang dapat (Schöpfel & Prost, 2013). Dalam hal ini pembatasan tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi yang bersifat *closed access* atau akses terbatas.

Akses yang tidak merata terhadap informasi ilmiah telah menjadi fenomena bersejarah, dan saat ini kesenjangan digital memperburuk ketidakseimbangan ketersediaan informasi (Álvarez et al., 2019). Misalnya dengan adanya tambahan biaya untuk mengakses informasi tertentu dalam suatu jurnal membuat masyarakat dengan ekonomi yang kurang akan sulit mengakses informasi tersebut. Namun informasi yang bersifat *closed access* memiliki kelebihan dalam memberikan informasi yang lebih

kredibel dan relevan dengan kebutuhan pemustaka. Penerapan kebijakan *closed access* di perpustakaan telah diteliti dan telah ditemukan bahwa umumnya pelajar puas dengan kebijakan ini karena dapat memanfaatkan sumber daya perpustakaan secara maksimal (Ajayi, 2003). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh D. Khan et al. (2023) bahwa pada jurnal yang berkaitan dengan Perpustakaan dan Sains Informasi dengan akses tertutup (*Non Open Access*) memiliki perbedaan jumlah sitasi yang signifikan dibandingkan dengan yang *Open Access*. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang bersifat *closed access* memiliki nilai yang cukup tinggi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Sebagai lembaga yang menjadi pusat informasi dan pengetahuan non komersial, perpustakaan memiliki peran penting dalam mendukung akses informasi bagi masyarakat. Perpustakaan dapat membantu memenuhi kebutuhan informasi pemustaka dengan menyediakan bahan pustaka yang relevan dan berkualitas (A. Lubis, 2022). Namun adanya informasi yang bersifat *open access* dan *closed access* mengharuskan perpustakaan untuk menetapkan kebijakan agar informasi yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Kebijakan tersebut harus dibuat dengan jelas dengan mendefinisikan tujuan dan sasaran perpustakaan, serta kegiatan apa saja yang dilarang. Dengan adanya kebijakan tersebut, perpustakaan diharapkan mampu membuat pemustaka dapat mengakses informasi yang bersifat *open access* atau *closed access* namun tetap memperhatikan peraturan yang ada.

Penelitian mengenai kebijakan perpustakaan terhadap akses informasi sebelumnya dilakukan oleh Sahidi (2017) yang menjelaskan bahwa pentingnya kebijakan *open access* informasi bagi perpustakaan perguruan tinggi agar dapat memberikan akses seluas-luasnya terhadap informasi sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemustaka. Selain itu dengan menerapkan kebijakan *open access* dapat memberikan akses literatur semaksimal mungkin bagi seluruh pemustaka. Kebijakan *open access* juga membuat perguruan tinggi dapat meningkatkan *branding* lembaga dan berdampak pada publikasi ilmiah yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan keterbukaan informasi memberikan banyak manfaat bagi pemustaka, perpustakaan dan lembaga yang menaungi untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan yang ada.

Kebijakan terhadap akses informasi memberikan perbedaan kualitas informasi yang diterima oleh pemustaka. Perpustakaan sebagai lembaga informasi *non profit* berperan penting untuk dapat memberikan kualitas informasi yang setara kepada seluruh lapisan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana kebijakan perpustakaan dapat mempengaruhi akses informasi yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat? Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan memetakan secara bibliometrik hasil penelitian pada *database Dimensions* yang berkaitan dengan topik kebijakan perpustakaan dan akses informasi. Analisis dan pemetaan dilakukan berdasarkan 4 (empat) kategori yaitu penulis, sumber penelitian, negara dan kata yang sering muncul untuk mengetahui kondisi terkini terkait topik penelitian ini sehingga dapat diketahui pengaruh kebijakan perpustakaan dalam mempengaruhi akses informasi yang inklusif, dan adil, serta kualitas informasi yang didapatkan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tinjauan Pustaka Kebijakan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2023) mengartikan kebijakan sebagai “rangkaiannya konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak”. Sementara itu, menurut Ramdhani & Ramdhani (2017) kebijakan merupakan serangkaian rencana program, kegiatan, tindakan, keputusan, sikap untuk bertindak atau tidak bertindak yang dilakukan oleh pihak-pihak (aktor), sebagai tahapan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Berdasarkan definisi tersebut, kebijakan merupakan serangkaian konsep, rencana, dan tindakan

yang menjadi pedoman dasar bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau menyelesaikan masalah. Sebagai lembaga informasi, perpustakaan juga diharuskan untuk memiliki kebijakan. Kebijakan tersebut harus mampu mendukung perannya sebagai tempat penelitian, ketersediaan teknologi, fasilitas pendukung yang nyaman dan lengkap, koleksi yang beragam, serta pustakawan yang kompeten (Labibah & Marwiyah, 2018).

Informasi

Menurut Joudrey & Taylor (2018), Informasi adalah data yang terorganisir. Kemudian Rodin (2021) menjelaskan lebih lanjut bahwa informasi adalah data dari fakta yang direkam dan diolah lebih lanjut menjadi sebuah bentuk yang bermanfaat bagi penggunanya. Rodin juga menambahkan bahwa informasi adalah hasil dari kegiatan pengolahan data yang menyajikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang telah mengalami pengolahan dan penyajian sedemikian rupa sehingga memiliki arti dan manfaat bagi penggunanya. Perpustakaan sebagai lembaga informasi dituntut untuk dapat memberikan akses informasi seluas mungkin kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya dengan mengembangkan perpustakaan digital. Strategi yang dapat digunakan untuk membangun dan mengembangkan akses informasi di perpustakaan digital menurut Arum & Marfianti (2021) diantaranya dengan menggunakan metode pengorganisasian dan manajemen perpustakaan digital; mengimplementasikan teknologi informasi dalam mengelola dan mengakses informasi; membuat kebijakan umum tentang aturan informasi untuk menjamin akses yang adil dan merata; mempertahankan nilai keanekaragaman budaya (multikultural) sebagai bagian dari pengembangan akses informasi; serta mengkoordinasikan sumber daya untuk pertukaran informasi.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi bibliometrik untuk menganalisis literatur yang terkait dengan topik pengaruh kebijakan perpustakaan terhadap akses informasi. Bibliometrik adalah analisis statistik pada artikel, buku, dan bentuk publikasi lainnya untuk menghitung kinerja para peneliti, organisasi, dan negara, sekaligus memetakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Saputro et al., 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh data dari *database Dimensions* menggunakan kata kunci ("*Library Policy*" AND "*Information Access*"). Data yang diekstrak mencakup metadata dokumen seperti judul, penulis, jurnal, kata kunci, daftar referensi, dan data lainnya supaya hasil analisis masih relevan dengan topik yang dikaji. Rentang publikasi yang dianalisis adalah 10 tahun terakhir (2014-2023) untuk mendapatkan gambaran terbaru mengenai topik yang sedang diteliti. Selanjutnya data yang didapat akan dianalisis menggunakan Biblioshiny yang digolongkan ke dalam beberapa kategori seperti *sources*, *authors*, *documents*, *social structure*, dan kategori lainnya. Biblioshiny adalah sebuah alat bibliometrik yang dikembangkan dalam program R-studio, yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas tulisan penelitian tentang topik tertentu yang berhubungan dengan sebab akibat (Bakshi & Verma, 2023).

Data yang sudah dianalisis akan divisualisasikan dalam bentuk tabel dan gambar yang dilakukan juga dengan menggunakan Biblioshiny. Selanjutnya hasil visualisasi penelitian akan dikelompokkan sesuai dengan kategori dan informasi yang muncul berdasarkan kata kunci, penulis, jenis dokumen dan data lainnya untuk dapat memvisualisasikan hasil kajian mengenai kebijakan perpustakaan terhadap akses informasi. Fitur visualisasi pada biblioshiny seperti analisis konten, *word clouds*, dan analisis kutipan dapat memberikan representasi visual tentang hasil penelitian, sehingga lebih mudah untuk memahami dan menganalisis data dalam jumlah besar (Silva et al., 2022). Selanjutnya setelah hasil

visualisasi selesai, maka akan dibuat kesimpulan berupa narasi deskriptif yang dikaitkan dengan topik kebijakan perpustakaan terhadap akses informasi.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Penulis

Berdasarkan hasil pengolahan data pada topik kebijakan perpustakaan dan akses informasi, terdapat 287 penulis yang mengkaji tentang topik penelitian ini dan terdapat 10 penulis yang memiliki kutipan teratas dengan kontribusi yang cukup besar.

Tabel 1. Daftar penulis artikel dengan kutipan tertinggi

Penulis	Kutipan	Judul	Jurnal	Keterangan
Brook et al. (2015)	66	<i>In Pursuit of Antiracist Social Justice: Denaturalizing Whiteness in the Academic Library</i>	<i>Library Trends</i>	Close access
Khan & Qutab (2016)	35	<i>Understanding research students' behavioural intention in the adoption of digital libraries</i>	<i>Library Review</i>	Close access
Jun (2020)	28	<i>A Study on the Current Status and Improvement of the Digital Divide among Older People in Korea</i>	<i>International Journal of Environmental Research and Public Health</i>	Open access
Lor (2018)	26	<i>Democracy, information, and libraries in a time of post-truth discourse</i>	<i>Library Management</i>	Close access
Agosti et al. (2016)	22	<i>Digital library interoperability at high level of abstraction</i>	<i>Future Generation Computer Systems</i>	Close access
Lund (2020)	21	<i>Review of the Delphi method in library and information science research</i>	<i>Journal of Documentation</i>	Close access
Barniskis (2016)	20	<i>Access and Express: Professional Perspectives on Public Library Makerspaces and Intellectual Freedom</i>	<i>Public Library Quarterly</i>	Close access
Mugwisi et al. (2018)	19	<i>Public libraries as facilitators of information services: A case study of selected libraries in KwaZulu-Natal</i>	<i>Information Development</i>	Close access
Phukubje & Ngoepe (2016)	18	<i>Convenience and accessibility of library services to students with disabilities at the University of Limpopo in South Africa</i>	<i>Journal of Librarianship and Information Science</i>	Close access
Kumbier & Starkey (2016)	18	<i>Access Is Not Problem Solving: Disability Justice and Libraries</i>	<i>Library Trends</i>	Close access

Sumber: Data Penelitian Diolah (2023)

Pada tabel di atas, artikel dengan sitasi tertinggi ditulis oleh Brook et al. (2015) dengan 66 sitasi. Dari daftar judul 10 artikel yang paling banyak disitasi, terlihat bahwa sebagian besar artikel membahas isu-isu yang berkaitan erat dengan kebijakan perpustakaan dalam menyediakan akses informasi bagi pemustaka. Beberapa artikel secara khusus membahas hambatan dan tantangan yang dihadapi perpustakaan dalam menyediakan akses informasi yang adil, khususnya bagi kelompok minoritas dan penyandang disabilitas. Contohnya artikel dari Brook et al. (2015) yang mengkritik dengan tajam adanya prasangka tersirat yang masih melekat pada beberapa perpustakaan akademik di Amerika Serikat. Kumbier & Starkey (2016) bahkan lebih jauh menyatakan bahwa aksesibilitas fisik saja tidak cukup, perpustakaan harus benar-benar bersikap adil dalam kebijakan dan pengambilan keputusan untuk

mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial bagi komunitas penyandang disabilitas. Di sisi lain, artikel yang ditulis oleh Mugwisi et al. (2018) dan Phukubje & Ngoepe (2016) menjelaskan peran perpustakaan umum di negara-negara berkembang dalam menyediakan akses informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Kedua penelitian tersebut menjelaskan bahwa banyak sekali kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perpustakaan, namun adanya keterbatasan seperti anggaran dan sumber daya membuat fungsi perpustakaan kurang berjalan secara optimal.

Analisis Sumber Penelitian

Sumber penelitian seperti jurnal dan prosiding merupakan karya tulis ilmiah yang memiliki dampak besar pada bidang ilmu pengetahuan. Dalam kajian kebijakan perpustakaan terhadap akses informasi, terdapat 125 sumber penelitian yang membahas topik ini dan terdapat 10 sumber teratas yang memiliki produktivitas tinggi pada topik ini.

Tabel 2. Daftar 10 sumber penelitian dengan jumlah artikel terbanyak

Sumber	Jumlah Artikel	Keterangan
Library trends	8	Close access
Journal of librarianship and information science	6	Closed and open access
Iasl annual conference proceedings	5	Open access
Ifla journal	5	Open access
Proceedings of the association for information science and technology	5	Close access
Public library quarterly	5	Closed and open access
Information development	4	Closed and open access
Evidence based library and information practice	3	Open access
Journal of education for library and information science	3	Close access
Journal of library administration	3	Closed and open access

Sumber: Data Penelitian Diolah (2023)

Berdasarkan 10 sumber di atas dapat dilihat bahwa *Library Trends* merupakan jurnal yang paling banyak mempublikasikan artikel dengan jumlah 8 artikel. Diikuti oleh *Journal of Librarianship and Information Science* dengan 6 artikel, kemudian *IASL Annual Conference Proceedings* dan *IFLA Journal* dengan masing-masing 5 artikel. Keempat sumber ini merupakan *platform* publikasi utama untuk topik-topik penelitian di bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Apabila dikaitkan dengan topik penelitian kebijakan perpustakaan terhadap akses informasi, keempat jurnal tersebut berpotensi menjadi *platform* yang efektif untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai topik ini, mengingat fokus dan ruang lingkupnya yang sesuai. Jurnal lain seperti *Public Library Quarterly* dan *Information Development* juga relevan bagi para peneliti perpustakaan untuk mempublikasikan hasil penelitiannya mengenai isu kebijakan akses informasi dan peran perpustakaan umum. Sehingga temuan dan ide gagasan solutif dari para peneliti dapat mengembangkan kebijakan perpustakaan yang adil dan terbuka semakin tersebar dengan baik kepada khalayak yang lebih luas.

Analisis Negara

Penelitian bibliometrik ini menggunakan beberapa artikel yang tersebar dari seluruh dunia untuk menghasilkan perspektif yang beragam dari setiap negara. Pada Tabel 3 dapat dilihat sejumlah negara yang memproduksi karya ilmiah paling banyak terkait topik penelitian ini.

Tabel 3. Daftar 10 negara dengan produksi ilmiah negara tertinggi

Negara	Frekuensi
USA	50
South Africa	20
Nigeria	13
India	9
Pakistan	6
South Korea	5
Canada	4
Kenya	4
Lithuania	4
Turkey	4

Sumber: Data Penelitian Diolah (2023)

Tabel 3 di atas memetakan capaian produktivitas ilmiah para peneliti yang mengkaji kebijakan perpustakaan dan akses informasi dari berbagai negara. Berdasarkan jumlah artikel penelitian yang dihasilkan dapat dilihat bahwa para peneliti dari Amerika Serikat mendominasi dengan jumlah 50 artikel, dan disusul oleh Afrika Selatan dengan 20 artikel. Kedua negara ini merupakan penggerak penelitian pada kajian yang berkaitan dengan kebijakan perpustakaan terhadap akses informasi secara global. Negara maju dan berkembang ini memiliki peluang besar untuk menghasilkan kajian-kajian tentang tantangan yang sedang dihadapi serta inovasi mengenai kebijakan perpustakaan dalam menyediakan akses informasi bagi warganya. Adanya produktivitas penelitian yang tinggi pada kedua negara tersebut diharapkan dapat terus memperkaya keilmuan dan pengetahuan mengenai akses informasi di perpustakaan, sehingga dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan perpustakaan nasional dan daerah di negara masing-masing yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Analisis Kata

Pada saat menganalisis tren penelitian mengenai kebijakan perpustakaan dan akses informasi, peneliti menggunakan 2 kata yang sering muncul pada abstrak untuk mengetahui kata apa saja yang sering muncul pada topik penelitian ini. Kata “*public libraries*” dan “*public library*” mendominasi penelitian ini, ditandai dengan semakin besarnya ukuran huruf dari kata tersebut yang menunjukkan bahwa dalam penelitian ini perpustakaan umum berperan penting dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat luas. Selain itu, besarnya huruf pada kata “*academic libraries*”, “*university libraries*”, serta “*information services*” menunjukkan bahwa penelitian juga memberikan perhatian yang besar terhadap peran perpustakaan dalam bidang pendidikan terutama di perguruan tinggi. Hal ini memberikan tantangan bagi perpustakaan untuk dapat memberikan akses informasi dengan sumber daya ilmiah berkualitas pada mahasiswa, dosen, dan pemustaka lainnya.



Gambar 1. *Word cloud* berdasarkan 2 kata yang sering muncul di abstrak
Sumber: Visualisasi data dengan biblioshiny (2023)

Kemudian kata “*library services*” juga muncul dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga menekankan pentingnya inovasi dan pengembangan layanan perpustakaan yang responsif terhadap kebutuhan pemustaka yang terus berubah. Selain itu, istilah lain yang cukup tinggi frekuensinya adalah “*Information literacy*” yang mencerminkan kesadaran bahwa akses fisik terhadap informasi tidaklah cukup. Perpustakaan harus berperan aktif dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif, terutama di era informasi digital yang penuh dengan tantangan seperti disinformasi dan informasi yang berlebihan.

Pembahasan

Pengaruh Kebijakan terhadap Akses Informasi yang Inklusif dan Adil

Berdasarkan hasil analisis bibliometrik menunjukkan bahwa kebijakan perpustakaan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penyediaan akses informasi yang inklusif dan adil. Pada 10 artikel dengan kutipan tertinggi menunjukkan berbagai tantangan yang dihadapi perpustakaan dalam mengupayakan pelayanan kepada berbagai kelompok pemustaka, terutama kelompok minoritas dan penyandang disabilitas. Brook et al. (2015) mengangkat isu penting mengenai rasisme struktural dalam perpustakaan akademik. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa perpustakaan akademik yang menjadi cerminan dari lembaga atau institusinya, masih menerapkan ketidaksetaraan sistemik yang ada dalam pendidikan tinggi. Hal ini terlihat dari dominasi budaya kulit putih dalam aspek-aspek seperti tata ruang perpustakaan, praktik perekrutan staff, hingga penerapan layanan referensi. Temuan ini menyoroti kebutuhan akan kebijakan yang secara aktif menantang dan mengubah struktur yang melanggengkan ketidaksetaraan.

Sementara itu, penelitian Phukubje & Ngoepe (2016) di Universitas Limpopo, Afrika Selatan, mengungkapkan tantangan dalam menyediakan akses yang memadai bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Meskipun telah ada unit layanan khusus, masih terdapat ketidakpuasan karena terbatasnya materi perpustakaan yang dapat diakses dan kurangnya staf khusus. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perpustakaan perlu memastikan alokasi sumber daya yang memadai untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Selanjutnya Kumbier & Starkey (2016) juga berpendapat bahwa

aksesibilitas fisik saja tidak cukup. Penelitian tersebut menekankan perlunya transformasi menyeluruh dalam sistem, keyakinan, dan praktik perpustakaan untuk menciptakan lingkungan perpustakaan yang inklusif. Pendapat ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penyediaan akses fisik, tetapi juga menerapkan pendekatan yang lebih kompleks dalam perpustakaan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kesenjangan digital, seperti yang diungkapkan oleh Jun (2020) dalam penelitiannya tentang lansia (lanjut usia) di Korea. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan perpustakaan perlu mempertimbangkan perbedaan generasi dalam literasi digital dan berfokus pada peningkatan kapasitas digital melalui berbagai bentuk pendidikan. Selanjutnya dalam konteks negara berkembang, Mugwisi et al. (2018) meneliti peran perpustakaan umum di KwaZulu-Natal, Afrika Selatan. Penelitian ini mengemukakan bahwa perpustakaan melayani beragam pengguna dengan kebutuhan informasi yang berbeda-beda, namun menghadapi beberapa tantangan seperti dana yang terbatas dan kurangnya keterampilan pada pustakawan. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan perpustakaan perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dalam upaya menyediakan akses informasi yang inklusif.

Penelitian mengenai kebijakan perpustakaan dan akses informasi telah menjadi fokus global yang ditandai dengan adanya penelitian di beberapa negara. Berdasarkan data produktivitas ilmiah, Amerika Serikat memimpin dengan 50 artikel dan Afrika Selatan dengan 20 artikel, serta diikuti beberapa negara lainnya. Dominasi ini menunjukkan keragaman sudut pandang dan konteks dalam penelitian kebijakan perpustakaan dan akses informasi. Penelitian Brook et al. (2015) yang mengkritisi rasisme struktural dalam perpustakaan akademik di Amerika Serikat, menjadi relevan ketika melihat dominasi penelitian AS dalam bidang ini. Dengan 50 artikel pada penelitian ini, peneliti AS memiliki platform yang kuat untuk mengangkat dan mengatasi isu-isu keadilan sosial dalam yang berkaitan dengan perpustakaan di negaranya. Selanjutnya kontribusi dari Afrika Selatan, dengan 20 artikel, sejalan dengan temuan Phukubje & Ngoepe (2016) serta Mugwisi et al. (2018) yang membahas tantangan aksesibilitas di perpustakaan Afrika Selatan. Posisi Afrika Selatan yang berada di urutan kedua menunjukkan komitmen negara ini dalam mengatasi masalah aksesibilitas dan inklusi di perpustakaan negara tersebut, terutama dalam konteks negara berkembang dengan keterbatasan sumber dayanya.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai akses informasi yang inklusif dan adil, kebijakan perpustakaan perlu bersifat dinamis dan responsif. Kebijakan tersebut harus secara aktif menantang ketidaksetaraan struktural, mampu mengalokasikan sumber daya untuk aksesibilitas yang baik, dan mempertimbangkan kesenjangan pengetahuan antar generasi. Kebijakan perpustakaan harus secara konsisten mengevaluasi dampaknya terhadap berbagai kelompok pengguna untuk memastikan bahwa perpustakaan benar-benar menjadi ruang yang inklusif dan adil bagi seluruh kalangan pemustaka.

Pengaruh Kebijakan terhadap Akses Informasi yang Berkualitas

Berdasarkan analisis sumber penelitian menunjukkan suatu gambaran mengenai dinamika akses dan kredibilitas dalam publikasi ilmiah. Terdapat beragam jenis akses pada sumber yang mempublikasikan artikel-artikel terkait kebijakan perpustakaan dan akses informasi yang didominasi oleh sumber dengan akses terbatas atau *closed access*. *Library Trends* merupakan jurnal dengan kontribusi artikel terbanyak (8 artikel) dan merupakan jurnal dengan akses terbatas. Begitu pula dengan *Proceedings of the Association for Information Science and Technology* yang juga termasuk dalam kategori *closed access*. Dominasi sumber *closed access* menunjukkan bahwa sumber dengan kategori ini seringkali dianggap lebih kredibel di lingkungan akademik karena proses seleksi dan tinjauan yang ketat oleh publisher. Padahal pandangan tersebut tidak selalu benar, mengingat jurnal dengan kategori *open*

access juga menggunakan proses *peer review*, bahkan beberapa jurnal memiliki *Journal Impact Factor* (Schmitz, n.d.).

Selain *closed access*, terdapat juga kontribusi dari beberapa sumber dengan kategori *open access* seperti *IASL Annual Conference Proceedings* dan *IFLA Journal*. Sumber dengan kategori *open access* ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kredibilitas dan aksesibilitas dalam penyebaran pengetahuan ilmiah tentang kebijakan perpustakaan terhadap akses informasi. *Journal of Librarianship and Information Science*, *Public Library Quarterly*, dan *Information Development* yang memiliki model *closed and open access* menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pendekatan publikasi. Model hybrid ini menjelaskan adanya upaya untuk menjembatani kesenjangan antara kredibilitas yang diasosiasikan dengan jurnal *closed access* dan prinsip keterbukaan akses informasi. Ketiga kategori akses informasi ini menunjukkan hal yang cukup menarik dalam menentukan kualitas informasi dari berbagai sumber penelitian.

Pada hasil analisis penulis menunjukkan bahwa 9 dari 10 artikel yang paling banyak dikutip berasal dari jurnal dengan akses terbatas (*closed access*) yang cenderung memiliki kualitas informasi dengan kredibilitas lebih tinggi. Namun disisi lain, hal ini dapat membatasi akses terhadap informasi penting bagi peneliti dan pembuat kebijakan yang tidak memiliki akses ke sumber-sumber tersebut. Keberadaan satu artikel dengan kategori *open access* di antara 10 artikel yang paling banyak dikutip memberikan sudut pandang yang baru. Penelitian berkualitas tinggi dan berpengaruh juga dapat dipublikasikan dan mendapat pengakuan melalui platform *open access*. Meskipun masih minoritas, hal ini menunjukkan adanya pergeseran bertahap menuju model publikasi yang lebih terbuka. Oleh karena itu, untuk mendukung gerakan *open access* terutama di Indonesia, pengelola jurnal harus memperhatikan kebijakan dari OAJ (*Open Access Journal*) mengenai pernyataan kebijakan *open access*, hak cipta, privasi, lisensi, serta langganan publikasi (Yudhanto & Nashihuddin, 2017).

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis tren penelitian mengenai kebijakan perpustakaan dan akses informasi mengungkapkan kompleksitas tantangan yang dihadapi perpustakaan dalam menyeimbangkan kualitas informasi bagi seluruh kalangan masyarakat. Dominasi kata seperti “*public libraries*”, “*public library*”, “*academic libraries*”, “*university libraries*”, dan “*information services*” dalam *word cloud* menggambarkan fokus utama penelitian dilakukan pada lembaga-lembaga yang berperan krusial dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat luas. Temuan ini menunjukkan bahwa perpustakaan, terutama perpustakaan umum dan akademik, berada di garis terdepan dalam upaya menyeimbangkan penyediaan informasi berkualitas dan terjangkau di tengah banyaknya sumber informasi dengan kategori *closed access*. Perpustakaan dapat melakukan kolaborasi antar lembaga untuk memperluas akses ke sumber daya ilmiah berkualitas tinggi bagi seluruh masyarakat. Salah satunya dengan TBM (Taman Bacaan Masyarakat) agar akses informasi dapat menjangkau ke masyarakat khususnya bagi daerah terpencil (Kinanti et al., 2023).

Program literasi informasi menjadi semakin krusial, sesuai dengan munculnya kata “*information literacy*” dalam *word cloud*. Perpustakaan dapat mengembangkan program-program yang membantu pengguna memahami cara mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber, termasuk sumber-sumber *open access* dan *closed access*. Kemudian inovasi dalam layanan perpustakaan, seperti yang ditunjukkan oleh istilah “*library services*” dalam *word cloud*, juga menjadi kunci dalam memastikan kualitas informasi yang diberikan untuk pemustaka. Hal ini dapat berupa pengembangan platform digital yang memudahkan akses ke berbagai sumber informasi. Seperti yang dilakukan oleh Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan membuat layanan *book delivery service* dan *reservation book* untuk masyarakat yang kesulitan dalam mencari literatur cetak sesuai kebutuhan namun tidak bisa hadir secara langsung ke perpustakaan (Wulansari et al., 2021).

Berdasarkan hal tersebut, perpustakaan berperan penting dan menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan antara sumber informasi *open access* dan *closed access*. Pemanfaatan teknologi, membangun kolaborasi, membuat program literasi informasi, dan inovasi layanan pada perpustakaan yang menyesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dalam penyediaan akses informasi. Perpustakaan perlu merancang kebijakan yang dapat memastikan bahwa perpustakaan tetap relevan dan efektif di era informasi digital yang terus berkembang. Kebijakan perpustakaan perlu bersifat dinamis dan responsif serta terus beradaptasi dengan perubahan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip akses informasi yang adil. Kemudian perpustakaan juga harus terus berinovasi, dan berkolaborasi untuk memenuhi perannya sebagai lembaga informasi yang inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Kesimpulan

Penelitian tentang kebijakan perpustakaan dan akses informasi mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi perpustakaan saat ini. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perpustakaan memiliki pengaruh dalam menyediakan akses informasi yang inklusif, adil dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan akses, terutama bagi kelompok minoritas dan penyandang disabilitas. Perpustakaan perlu mengembangkan kebijakan yang dinamis dan responsif untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural, meningkatkan alokasi sumber daya untuk aksesibilitas, dan menjembatani kesenjangan digital antar generasi. Tren penelitian menunjukkan fokus penelitian ini ada pada perpustakaan umum dan akademis sebagai garda terdepan dalam menyediakan akses informasi ke masyarakat luas. Keseimbangan antara sumber informasi *open access* dan *closed access* menjadi isu penting dalam menentukan kebijakan. Perpustakaan berperan penting dalam menjembatani kesenjangan ini melalui inovasi layanan, program literasi informasi, dan kolaborasi antar lembaga. Kemudian untuk penelitian selanjutnya dapat mengkaji identifikasi area penelitian yang masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait praktik-praktik terbaik dalam merumuskan kebijakan akses informasi.

Daftar Pustaka

- A. Lubis, N. R. (2022). Informasi berbasis media sosial pada perpustakaan digital. *Jurnal Pari*, 8(1), 53–56. <https://doi.org/10.15578/jp.v8i1.11517>
- Ajayi, N. A. (2003). Closed-access policy as a solution to library crime: perception and view of students. *Libri*, 53(3), 221–225. <https://doi.org/10.1515/LIBR.2003.221>
- Álvarez, J. E., Rodríguez, G., & Valentín, A. (2019). Navigating murky waters between closed- and open-access content: The role of libraries and their institutional repositories. *UPR Recinto De Mayagüez*, 1–10. <https://hdl.handle.net/20.500.11801/2527>
- Arum, A. P., & Marfianti, Y. (2021). Pengembangan perpustakaan digital untuk mempermudah akses informasi. *Information Science and Library*, 2(2), 92–100. <https://doi.org/10.26623/jisl.v2i2.3290>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). Kebijakan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

- Bakshi, M. & Verma, R. (2023). Trends in cause-related marketing (crm): Scientometrics analysis through prism of biblioshiny. *International Journal of Professional Business Review*, 8(4), 995. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.995>
- Brook, F., Ellenwood, D., & Lazzaro, A. E. (2015). In pursuit of antiracist social justice: denaturalizing whiteness in the academic library. *Library Trends*, 64(2), 246–284. <https://doi.org/10.1353/lib.2015.0048>
- Davlatov, S. (2022). The leading role of the librarian in providing library and information services to users. *Infolib*, 29(1), 30–35. <https://doi.org/10.47267/2181-8207/2022/1-100>
- European Bank. (2019). *Access to information policy*. European Bank.
- Joudrey, D. N., & Taylor, A. G. (2018). *The organization of information* (4th ed.). Libraries Unlimited.
- Jun, W. (2020). A study on the current status and improvement of the digital divide among older people in Korea. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(11), 3917. <https://doi.org/10.3390/ijerph17113917>
- Kassahun, K., & Nsala, C. (2017). The awareness of academic librarians towards open access resources to support reference services: A case of private institutions of higher learning in Gaborone, Botswana. *Session S12 - Reference as Service and Place - Satellite Meeting: Reference and Information Services*, 1–10. <https://library.ifla.org/id/eprint/1964/>
- Khan, D., Ashar, M., & Yuvaraj, M. (2023). Do open access journals have a greater citation impact? A study of journals in library and information science. *Collection and Curation*, 42(1), 13–24. <https://doi.org/10.1108/CC-03-2022-0010>
- Kinanti, K., Sulastari, I., & Yulianti, S. (2023). Kolaborasi perpustakaan umum dan tbn dalam penyediaan akses koleksi perpustakaan bagi masyarakat daerah terpencil. *Media Pustakawan*, 30(3), 295–309. <https://doi.org/10.37014/medpus.v30i3.4988>
- Kumbier, A., & Starkey, J. (2016). Access is not problem solving: disability justice and libraries. *Library Trends*, 64(3), 468–491. <https://doi.org/10.1353/lib.2016.0004>
- Labibah, L., & Marwiyah, M. (2018). Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga sebagai research library: Study feasibility menuju world class university library. *Al Maktabah*, 17(1), 42–57. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-maktabah/article/view/11068>
- Mugwisi, T., Jiyane, G. V., & Fombad, M. C. (2018). Public libraries as facilitators of information services. *Information Development*, 34(1), 31–43. <https://doi.org/10.1177/0266666916672718>
- Phukubje, J., & Ngoepe, M. (2016). Convenience and accessibility of library services to students with disabilities at the University of Limpopo in South Africa. *Journal of Librarianship and Information Science*, 49(2), 180–190. <https://doi.org/10.1177/0961000616654959>

- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1>
- Rodin, R. (2021). *Dasar-dasar organisasi informasi: Teori dan praktik pengorganisasian dokumen perpustakaan dan informasi*. Lembaga Chakra Brahma Lentera.
- Sahidi. (2017). Peran kebijakan open access informasi dalam membangun komunikasi ilmiah di perpustakaan perguruan tinggi. *Jupiter*, XVI(1), 43–50. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jupiter/article/download/4214/2407>
- Saputro, D. R. S., Prasetyo, H., Wibowo, A., Khairina, F., Sidiq, K., & Wibowo, G. N. A. (2023). Bibliometric analysis of neural basis expansion analysis for interpretable time series (n-beats) for research trend mapping. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 17(2), 1103–1112. <https://doi.org/10.30598/barekengvol17iss2pp1103-1112>
- Schmitz, J. (n.d.). *Open access vs. closed access*. Publisso. <https://www.publisso.de/en/advice/publishing-advice-faqs/open-access-vs-closed-access>
- Schöpfel, J., & Prost, H. (2013). Degrees of secrecy in an open environment. The case of electronic theses and dissertations. *Essachess - Journal for Communication Studies*, 6(2), 65–86. <https://www.essachess.com/index.php/jcs/article/view/214>
- Silva, M. do S. T., Oliveira, V. M. de, & Correia, S. É. N. (2022). Scientific mapping in Scopus with Biblioshiny: A bibliometric analysis of organizational tensions. *Contextus – Revista Contemporânea de Economia e Gestão*, 20(5), 54–71. <https://doi.org/10.19094/contextus.2022.72151>
- Wojturska, R. (2022). Diamond open access publishing in the library. In *Edinburgh Open Research* (pp. 1–13). <https://doi.org/10.2218/eorc.2022.6953>
- Wulansari, A., Albab, M. U., Priatna, Y., & Subhan, A. (2021). Inovasi layanan perpustakaan di era pandemi covid-19 (best practice Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo). *Publication Library and Information Science*, 4(2), 44–60. <https://doi.org/10.24269/pls.v4i2.3610>
- Yudhanto, S., & Nashihuddin, W. (2017). Upaya pustakawan dalam peningkatan kualitas jurnal dan mendukung gerakan open access journal di Indonesia. *Pustakaloka*, 9(2), 283–311. <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v9i2.1090>
- Yusniah, Y., Nasution, K. A., & Lubis, S. R. (2023). Open open access sebagai media jaringan kerjasama perpustakaan perguruan tinggi. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 227–232. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i1.2385>

Zheng, X., Pan, L., Lu, B., & Jin, Y. (2022). Theme mining and quantitative evaluation of library policies. *Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering*, 22(6), 2227–2241. <https://doi.org/10.3233/JCM-226360>